



ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE REGIONAL BUDGET REALIZATION IN BANTEN PROVINCE FOR 2020–2024: A REGIONAL FISCAL BALANCE PERSPECTIVE

Septi Nurmalita¹, Rochma Sudiati², Deas Shaqilla Putri³

¹ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

² Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

³ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

septi.nurmalita@unj.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 10 Juli 2025

Tgl. Diterima: 29 Juli 2025

Tersedia Online: 31 Juli 2025

Keywords:

Local Government Budget, Fiscal Balance, Budget Effectiveness

ABSTRAK/ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness and efficiency of the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Banten Province for the years 2020–2024 and its implications for the region's fiscal balance. Using a descriptive qualitative approach and ratio analysis, the study evaluates the performance of revenue realization, expenditure efficiency, and trends in fiscal balance. The results indicate that regional revenue realization generally falls into the effective to highly effective category, reflecting strong fiscal capacity. However, expenditure efficiency shows fluctuations, with two years classified as efficient and the remaining three years as less efficient or inefficient, indicating the need to strengthen budget discipline. In terms of fiscal balance, Banten Province experienced a surplus in 2020 and 2024, while in 2021–2023, a deficit occurred, though still within moderate limits. These findings highlight the importance of improving fiscal management and budget planning to maintain regional fiscal stability sustainably. This research provides empirical contributions to local governments in enhancing APBD performance and strengthening long-term fiscal independence.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peran vital dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Sebagai instrumen utama fiskal daerah, APBD menentukan arah prioritas pembangunan sekaligus menjadi alat distribusi sumber daya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave,

1989). Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemerintah daerah mencapai tujuan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan ketimpangan sosial (Fitriani et al., 2024)

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri. Namun,

otonomi ini juga membawa tantangan besar: bagaimana memastikan bahwa APBD dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel (World Bank, 2021). Ketidakmampuan dalam mengelola APBD dapat berujung pada ketidakseimbangan fiskal, ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat, hingga melemahnya kapasitas pembangunan daerah. Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi strategis di Pulau Jawa menunjukkan dinamika pengelolaan APBD yang menarik untuk dikaji. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, total APBD Provinsi Banten mengalami fluktuasi, dengan tren kenaikan pasca-pandemi COVID-19.

Tabel 1.1 APBD dan realisasi belanja Provinsi Banten

Tahun	APBD (dalam milyaran rupiah)	Realisasi (dalam milyaran rupiah)	%
2020	Rp12.609,36	Rp10.334,12	81.96
2021	Rp11.633,13	Rp11.623,32	99.92
2022	Rp10.645,88	Rp11.205,65	105.26
2023	Rp11.547,46	11.576,54	100.25
2024	Rp12.408,21	12.392,00M	99.87

Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id/>
(data diolah)

Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur dari sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target output pembangunan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan (Sudiana et al., 2024). Sementara itu, efisiensi dalam pengelolaan APBD merefleksikan seberapa optimal penggunaan sumber daya fiskal untuk menghasilkan capaian pembangunan yang diharapkan. Dengan demikian, kedua aspek ini menjadi parameter penting dalam mengevaluasi kinerja fiskal daerah.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Banten, dalam upaya merealisasikan APBD secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan utama adalah Salah satu tantangan utama dalam desentralisasi fiskal di Indonesia selama dua dekade terakhir adalah pengelolaan belanja daerah yang berkualitas (Kementerian Keuangan, 2021) .Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara prioritas belanja dengan kebutuhan strategis pembangunan daerah.

Ketidakmampuan dalam mengelola APBD secara efektif dan efisien tidak hanya berdampak pada output pembangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan fiskal daerah. Dalam laporan (*OECD Economic Surveys: Indonesia 2018*, 2018), pentingnya pengelolaan fiskal yang baik di tingkat daerah mendukung pembangunan. Dalam konteks Provinsi Banten, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi sangat penting untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada transfer pusat dan untuk memastikan kapasitas fiskal daerah tetap kuat dalam jangka panjang.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Bagi dunia akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan fiskal daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Sementara itu, bagi praktisi pemerintahan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi empiris yang berguna dalam memperbaiki praktik pengelolaan APBD, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas fiskal daerah.

Dengan mengkaji efektivitas dan efisiensi realisasi APBD Provinsi Banten selama periode 2020–2024, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama dalam pelaksanaan anggaran, menganalisis tren keseimbangan fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data untuk memperkuat kemandirian fiskal dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen keuangan pemerintah daerah yang berfungsi untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi pengeluaran serta penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2023 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri, 2022)

APBD mencerminkan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah serta menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya fiskal untuk mendanai berbagai program dan kegiatan daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang harus disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan pemerataan.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, serta

membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020). LRA memberikan gambaran mengenai kinerja anggaran, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta kontribusinya terhadap tujuan fiskal yang telah direncanakan. LRA bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, serta menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Indikator penting yang tercantum dalam LRA meliputi realisasi pendapatan, realisasi belanja, surplus atau defisit anggaran, serta posisi pembiayaan.

Pengertian Keseimbangan Fiskal Daerah

Keseimbangan fiskal daerah mengacu pada kondisi di mana pendapatan daerah mencukupi untuk membiayai belanja daerah, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal, sehingga keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan (Bird & Smart, 2002). Dalam keadaan ideal, daerah yang memiliki keseimbangan fiskal yang baik mampu membiayai kebutuhan belanjanya dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat, tanpa menciptakan defisit yang berlebihan. Menurut (Tuwaidan et al., 2024) keseimbangan fiskal merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal daerah. Ketidakseimbangan fiskal, yang ditandai dengan defisit anggaran yang terus menerus atau ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, dapat melemahkan kapasitas pembangunan daerah, meningkatkan risiko fiskal, dan mengganggu stabilitas keuangan publik.

Evaluasi keseimbangan fiskal biasanya dilakukan dengan menganalisis rasio pendapatan terhadap belanja, rasio PAD terhadap total pendapatan, serta tren surplus atau defisit dalam laporan

keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Banten selama periode 2020–2024, khususnya dari sisi efektivitas dan efisiensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hubungannya terhadap keseimbangan fiskal daerah.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip fundamental yang harus dijalankan oleh entitas sektor publik (Mardiasmo, 2018). Efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang diharapkan dari suatu program atau kebijakan dapat tercapai, sedangkan efisiensi mencerminkan bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan output tersebut (Mahmudi, 2010). Dalam konteks APBD, efektivitas realisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah menjadi indikator utama dalam menilai kinerja fiskal daerah (Latifa et al., 2025). Efektivitas realisasi pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatannya, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pusat. Rasio realisasi terhadap target pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa proyeksi anggaran realistis dan dapat dicapai melalui strategi pemungutan yang efisien (Latifa et al., 2025). Efisiensi belanja daerah merupakan ukuran rasionalitas fiskal, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu merealisasikan belanja yang direncanakan dengan proporsi dan alokasi yang optimal, tanpa terjadi pemborosan (Mardiasmo, 2018). Efisiensi dicapai apabila belanja yang dikeluarkan sebanding atau lebih rendah dari output yang dihasilkan. Salah satu indikator kuantitatif efisiensi adalah rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja.

Penelitian oleh Fitriani (2019) di Jawa Barat juga menemukan bahwa efisiensi realisasi belanja yang konsisten selama lima tahun berkontribusi pada penguatan disiplin fiskal dan meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah daerah.

Keseimbangan fiskal daerah merupakan kondisi di mana pendapatan daerah mampu menutup kebutuhan belanja daerah tanpa menimbulkan tekanan defisit fiskal yang berlebihan (Bird & Smart, 2002). Efektivitas pendapatan yang tinggi akan memperbesar basis fiskal daerah, sementara efisiensi belanja akan menjaga agar pengeluaran tidak melebihi kapasitas fiskal. Menurut teori fiskal publik, keseimbangan antara pendapatan dan belanja harus dijaga untuk mencapai sustainability dalam jangka panjang (Musgrave & Musgrave, 1989). Pemerintah daerah yang berhasil mengelola pendapatannya secara efektif dan belanjanya secara efisien akan lebih mungkin menjaga struktur anggarannya dalam kondisi seimbang.

Dalam studi oleh Wiratno (2020), ditemukan bahwa kombinasi efektivitas dan efisiensi APBD secara statistik berpengaruh signifikan terhadap terciptanya surplus fiskal dan mengurangi risiko fiskal pada tingkat daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD secara simultan berkontribusi positif terhadap keseimbangan fiskal daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta

keseimbangan fiskal Provinsi Banten dalam periode tahun 2020–2024.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna di balik fenomena fiskal yang diamati dan memberikan penjelasan naratif terhadap data numerik, bukan untuk menguji hipotesis atau hubungan statistik antar variable. Pendekatan deskriptif kualitatif ini sesuai digunakan dalam penelitian kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah karena dapat mengeksplorasi konteks, tren, dan interpretasi yang bersifat multidimensi (Sugiyono, 2020).

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Banten, dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah melalui instrumen APBD. Objek penelitian mencakup data agregat APBD yang terdiri dari target dan realisasi pendapatan daerah, Anggaran dan realisasi belanja daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat publik dan bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data diperoleh melalui situs resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis rasio, yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan fiskal. Berikut adalah indikator dan rumus analisis yang digunakan:

Analisis Efektivitas Pendapatan

Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang direncanakan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

(Mahsun, 2006)

Kategori Efektivitas menurut (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020, n.d.); (Mahmudi, 2010)):

Rasio Efektivitas (%)	Kategori
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% - < 100\%$	Efektif
$80\% - < 90\%$	Cukup Efektif
$60\% - < 80\%$	Kurang Efektif
$< 60\%$	Tidak Efektif

Analisis Efisiensi Belanja

Efisiensi belanja mengukur sejauh mana belanja daerah direalisasikan tanpa pemborosan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

Kategori Efisiensi (Permendagri 77/2020; (Mardiasmo, 2018)

Rasio Efisiensi (%)	Kategori
$< 90\%$	Sangat Efisien
$90\% - < 95\%$	Efisien
$95\% - 100\%$	Cukup Efisien
$> 100\%$	Tidak Efisien (Over Budget)

Analisis Keseimbangan Fiskal

Secara teknis, keseimbangan fiskal dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama. Pertama, dengan menghitung selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dalam suatu tahun anggaran. Selisih ini menunjukkan apakah daerah mengalami surplus fiskal (jika pendapatan melebihi belanja) atau defisit fiskal (jika belanja melebihi pendapatan). Surplus menunjukkan kemampuan daerah mengelola anggaran secara hati-hati dan efisien, sedangkan defisit dapat mengindikasikan adanya potensi pembiayaan yang tidak sehat jika tidak dikelola secara bijak ((Musgrave & Musgrave, 1989)).

Kedua, keseimbangan fiskal juga diukur melalui perhitungan rasio antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio ini disebut sebagai rasio keseimbangan fiskal dan memberikan gambaran seberapa jauh belanja daerah ditopang oleh kemampuan penerimaan yang nyata, bukan hanya target anggaran. Rumus yang digunakan adalah:

1. Surplus/Defisit

$$= \text{Realisasi pendapatan} \\ - \text{Realisasi belanja}$$

$$2. \text{Rasio} = \left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Belanja}} \right) \\ \times 100\%$$

Kategori Keseimbangan Fiskal
(diadaptasi dari (Bird & Smart, 2002);
(Musgrave, 1989):

Rasio (%)	Status Keseimbangan
$\geq 110\%$	Sangat Seimbang
100% – 109%	Seimbang
90% – 99%	Kurang Seimbang
$< 90\%$	Tidak Seimbang / Defisit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Perhitungan efektivitas realisasi anggaran dan target pendapatan. Berikut merupakan hasil perbandingan realisasi pendapatan dengan target anggaran Provinsi Banten tahun 2020-2024 dalam Milyaran Rupiah :

Tahun	Pendapatan daerah	Realisasi
2024	Rp12,408.21	Rp12,392.00
2023	Rp11,547.46	Rp11,576.54
2022	Rp10,645.88	Rp11,205.65
2021	Rp11,633.13	Rp11,623.31
2020	Rp12,609.36	Rp10,334.12

Berdasarkan kriteria efektivitas dari Depdagri, kriteria realisasi pendapatan provinsi Banten tahun 2020-2024 dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tahun	Pendapatan daerah	Realisasi	Efektifitas	Kategori
2024	Rp12,408.21	Rp12,392.00	99.87%	Efektif
2023	Rp11,547.46	Rp11,576.54	100.25 %	Sangat efektif
2022	Rp10,645.88	Rp11,205.65	105.26 %	Sangat efektif
2021	Rp11,633.13	Rp11,623.31	99.92%	Efektif
2020	Rp12,609.36	Rp10,334.12	81.96%	Cukup efektif



Analisis efektivitas pendapatan daerah dilakukan dengan membandingkan antara target pendapatan yang telah direncanakan dalam APBD dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya, baik dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun penerimaan lainnya yang sah. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka semakin baik kinerja pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah (Mahmudi, 2010; Permendagri 77/2020)

Berdasarkan data yang diperoleh, efektivitas pendapatan daerah Provinsi Banten selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang relatif baik dan cenderung stabil. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas pendapatan daerah tercatat sebesar 81,96%, yang dikategorikan

sebagai cukup efektif. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi deviasi sebesar hampir 18%, pemerintah daerah masih mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan, meski kemungkinan besar terpengaruh oleh dampak awal pandemi COVID-19 terhadap penerimaan fiskal.

Kinerja meningkat signifikan pada tahun 2021, di mana efektivitas mencapai 99,92% dan dikategorikan sebagai efektif. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan dan strategi pemungutan yang lebih optimal. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana efektivitas realisasi pendapatan masing-masing tercatat sebesar 105,26% dan 100,25%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan bahwa estimasi perencanaan pendapatan cenderung konservatif, atau terdapat faktor-faktor tak terduga yang meningkatkan penerimaan (misalnya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan PAD, atau transfer tambahan dari pusat).

Namun, pada tahun 2024, tingkat efektivitas kembali menurun sedikit menjadi 99,87%, meskipun tetap berada dalam kategori efektif. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan target yang lebih ambisius atau keterbatasan optimalisasi sumber penerimaan pada awal tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, efektivitas pendapatan daerah Provinsi Banten selama periode 2020–2024 secara rata-

rata sebesar 97.45% dapat dikatakan efektif, dengan empat dari lima tahun berada dalam kategori efektif dan sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Banten memiliki kapasitas fiskal yang cukup baik dalam merealisasikan pendapatannya, serta mampu menjaga konsistensi performa pemungutan anggaran.

Analisis Efisiensi Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2020–2024

Perhitungan efektivitas menggunakan persentase perbandingan realisasi anggaran dan target anggaran. Berikut merupakan hasil perbandingan realisasi dengan target anggaran Provinsi Banten tahun 2020-2024 dalam Milyaran Rupiah :

Tabel 4.3

Anggaran belanja Provinsi Banten tahun 2020-2024 dalam Milyaran Rupiah

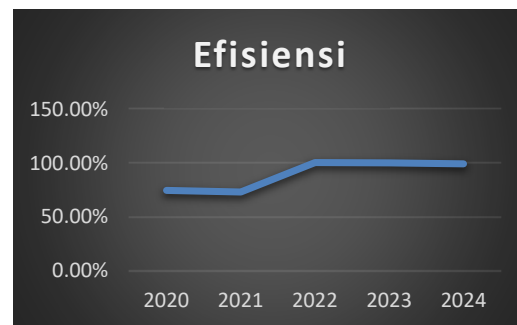
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi
2024	Rp12,356.58	Rp12,254.16
2023	Rp11,774.65	Rp11,814.13
2022	Rp11,223.18	Rp11,278.68
2021	Rp15,948.25	Rp11,660.63
2020	Rp13,214.39	Rp9,879.31

Berdasarkan kriteria efektivitas, kriteria realisasi belanja provinsi Banten tahun 2020-2024 dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Kategori Efisien

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Efisiensi	Kategori
2024	Rp12,356.58	Rp12,254.16	99.17%	Kurang efisien
2023	Rp11,774.65	Rp11,814.13	100.34%	Tidak efisien
2022	Rp11,223.18	Rp11,278.68	100.49%	Tidak efisien
2021	Rp15,948.25	Rp11,660.63	73.12%	Efisien
2020	Rp13,214.39	Rp9,879.31	74.76%	Efisien

Efisiensi belanja daerah merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran belanja secara optimal tanpa terjadi pemborosan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan APBD, belanja dikatakan efisien jika realisasinya tidak melebihi anggaran yang tersedia, namun tetap mampu menghasilkan output pembangunan yang direncanakan (Mardiasmo, 2018; Permendagri 77/2020).



Hasil analisis efisiensi belanja daerah Provinsi Banten selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi belanja tercatat sebesar 74,76%, yang dikategorikan sebagai efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan pengeluaran dengan

cukup hemat, meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Kinerja ini relatif stabil pada tahun 2021, di mana efisiensi belanja berada pada angka 73,12%, juga termasuk dalam kategori efisien.

Namun demikian, terjadi perubahan pola pada tahun 2022, 2023, dan 2024, di mana tingkat efisiensi justru melewati ambang batas wajar ($> 100\%$), yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, tingkat efisiensi belanja tercatat sebesar 100,49%, diikuti oleh 100,34% pada tahun 2023, dan 99,17% pada tahun 2024. Meskipun nilai efisiensi 2024 masih di bawah 100%, namun tetap dikategorikan sebagai kurang efisien karena mendekati batas atas, sementara dua tahun sebelumnya masuk dalam kategori tidak efisien.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, terjadi pelampauan belanja daerah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain revisi anggaran mendadak, penambahan kegiatan tidak terencana, atau kelemahan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran. Belanja yang tidak efisien dapat mengindikasikan lemahnya disiplin fiskal, serta potensi pemborosan anggaran yang berdampak pada alokasi dana untuk program prioritas.

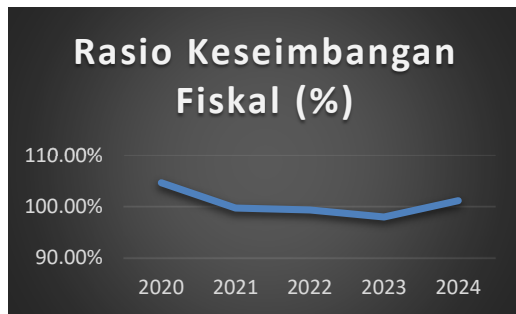
Secara keseluruhan, kinerja efisiensi belanja daerah Provinsi Banten selama lima tahun terakhir menunjukkan dua tahun efisien, satu tahun kurang efisien, dan dua tahun tidak efisien. Pola ini menandakan bahwa kendati ada upaya pengendalian belanja yang cukup baik pada awal periode, namun masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar prinsip

value for money dapat tercapai secara konsisten.

Efektivitas dan efisiensi APBD berkontribusi positif terhadap keseimbangan fiskal daerah

Dalam menentukan keseimbangan fiskal daerah, dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Hasil realisasi pendapatan dan belanja Provisinsi Banten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus(Defisit)	Rasio Keseimbangan Fiskal (%)	Kategori
2022	Rp12.392.00	Rp12.254.16	Rp137.84	101.12%	Sangat seimbang
2023	Rp11.576.54	Rp11.814.13	(Rp237.59)	97.99%	Kurang seimbang
2022	Rp11.205.65	Rp11.278.68	(Rp73.03)	99.35%	Kurang seimbang
2021	Rp11.623.31	Rp11.660.63	(Rp37.32)	99.68%	Kurang seimbang
2020	Rp10.334.12	Rp9.879.31	Rp454.81	104.60%	Sangat seimbang



Keseimbangan fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga hubungan yang sehat antara pendapatan dan belanja daerah. Evaluasi keseimbangan fiskal biasanya dilakukan melalui dua indikator utama, yakni selisih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dan rasio keseimbangan fiskal, yaitu perbandingan realisasi pendapatan terhadap belanja dalam bentuk persentase (Bird & Smart, 2002; Musgrave & Musgrave, 1989).

Berdasarkan hasil pengolahan data, Provinsi Banten menunjukkan dinamika fiskal yang menarik selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan sebesar Rp10,334.12 miliar melebihi realisasi belanja yang hanya Rp9,879.31 miliar, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp454.81 miliar. Rasio keseimbangan fiskal sebesar 104,60% menempatkan kondisi ini dalam kategori sangat seimbang, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati pada masa awal pandemi COVID-19.

Namun, pada tiga tahun berikutnya yaitu 2021, 2022, dan 2023, Provinsi Banten mengalami defisit anggaran secara beruntun. Meskipun nilai defisitnya tidak terlalu besar (berturut-turut Rp37.32 miliar, Rp73.03 miliar, dan Rp237.59 miliar), namun tetap menandakan terjadinya ketidakseimbangan fiskal.

Rasio fiskal tahun 2021 sebesar 99,68%, tahun 2022 sebesar 99,35%, dan tahun 2023 turun ke 97,99% dimana seluruhnya dikategorikan sebagai kurang seimbang. Hal ini mencerminkan bahwa walaupun realisasi pendapatan relatif tinggi dan belanja terkontrol, terdapat kecenderungan pemerintah daerah merealisasikan belanja sedikit melebihi kapasitas penerimaan aktual.

Pada tahun 2024, situasi kembali membaik. Dengan realisasi pendapatan Rp12,392.00 miliar dan belanja Rp12,254.16 miliar, terdapat surplus sebesar Rp137.84 miliar. Rasio keseimbangan fiskal tercatat sebesar 101,12%, sehingga masuk dalam kategori sangat seimbang. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian fiskal, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Banten sempat mengalami defisit pada beberapa tahun, nilai defisitnya masih dalam batas yang relatif moderat. Ini mengindikasikan bahwa kondisi fiskal daerah tetap dapat dikatakan stabil, dengan kecenderungan untuk kembali pada jalur keseimbangan di tahun 2024.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi realisasi APBD Provinsi Banten selama periode 2020–2024, serta mengkaji implikasinya terhadap keseimbangan fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. **Efektivitas realisasi pendapatan daerah** berada dalam kategori baik. Dalam lima tahun terakhir,

empat tahun menunjukkan efektivitas di atas 90%, bahkan dua tahun mencapai lebih dari 100%. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan secara optimal, meskipun tahun 2020 mengalami penurunan akibat tekanan pandemi.

2. **Efisiensi realisasi belanja daerah** menunjukkan pola yang kurang konsisten. Tahun 2020 dan 2021 tergolong efisien, namun pada 2022–2023 terjadi belanja yang melebihi anggaran (tidak efisien). Tahun 2024 kembali menunjukkan perbaikan meskipun masih dalam kategori kurang efisien. Hal ini menandakan perlunya penguatan dalam disiplin anggaran dan perencanaan berbasis kinerja.
3. **Keseimbangan fiskal daerah** mengalami surplus pada tahun 2020 dan 2024, namun mengalami defisit pada tiga tahun lainnya. Rasio fiskal yang mendekati atau sedikit di bawah 100% menandakan kondisi **kurang seimbang namun tidak ekstrem**, yang masih dalam batas fiskal moderat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Banten cenderung stabil, namun memerlukan penguatan manajemen fiskal agar konsisten berada dalam zona surplus.

REFERENCES

- Bird, M. R., & Smart, M. (2002). Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries. *World Development*, 30(6).
- Fitriani, N., Hayati, N., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, P. (2024). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5, 4196. www.madiunkab.go.id
- Kementerian Keuangan. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Latifa, A., Frinaldi, A., Eka Putri, N., Publik, A., & Negeri Padang, U. (2025). *Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Bpfe.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- OECD Economic Surveys: Indonesia 2018. (2018). OECD. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2018-en
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020.
- Permendagri (2022).
- Sudiana, D., Marpuah Jamilah, E., Arifin, Z., Firmansyah, I., Siswoyo, M., & Nursahidin, N. (2024). Effectiveness and Efficiency of Regional Revenue And Expenditure Management In Kuningan Regency. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 5(8), 867–876.

<https://doi.org/10.59188/devotion.v5i8.777>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tuwaidan, G. K., Masinambow, V. A. J., & Kawung, G. M. V. (2024). The Influence of Regional Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Independence Through Economic Growth in North Sulawesi Province. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(12), 3134–3150. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i12.1525>

World Bank. (2021). *Fiscal Decentralization, Local Public Sector Finance And Intergovernmental Fiscal Relations: A Primer*.